

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 2 usaha koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan organisasi bisnis yang berwatak ekonomi dan sosial, yang berarti bukan hanya memperhatikan aspek bisnisnya tetapi melainkan juga memperhatikan aspek sosialnya. Ciri utama yang membedakan koperasi dengan bentuk usaha lain terletak pada posisi anggotanya. Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki dan meningkatkan kehidupannya serta kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan (Febriyanti, 2013).

Semakin meningkatnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi dengan merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan buku Penunjang Akuntansi Keuangan untuk Koperasi dalam penyusunan laporan keuangan. Koperasi sebagai salah satu unit yang memberikan pinjaman kredit dan penjualan secara

kredit, tentunya sangat membutuhkan sistem pengendalian piutang yang baik dan benar agar dapat dipertanggungjawabkan pada saat rapat anggota.

Penjualan kredit dan kegiatan simpan pinjam merupakan beberapa aktivitas pokok dalam koperasi dan salah satu sumber bagi koperasi untuk mendapatkan profit yang memadai, sehingga penerimaan bunga dari piutang merupakan sumber bagi tersedianya modal kerja dan merupakan unsur yang paling penting dalam pengoperasian koperasi (Satiandra, 2015). Apabila pengelolaan kurang baik maka koperasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu koperasi membutuhkan penanganan yang lebih baik terhadap piutang dan anggota koperasi harus mampu mengendalikan piutangnya dengan baik karena resiko yang terkandung didalamnya cukup besar yaitu kemungkinan tidak tertagihnya piutang tepat pada waktunya ataupun tidak tepatnya jumlah penerimaan piutang, sehingga koperasi dapat menderita kerugian. Dengan semakin luasnya kegiatan aktifitas piutang, maka menimbulkan banyak permasalahan yang dihadapi manajemen, oleh karena itu di perlukan suatu alat atau cara khusus untuk mengawasi aktifitas piutang pada koperasi, yaitu sistem pengendalian internal yang baik terhadap piutang. Dengan adanya sistem pengendalian internal piutang maka akan mempengaruhi sistem kelancaran penerimaan piutang tak tertagih pada koperasi. Pengendalian yang baik dapat menekan sekecil mungkin atau menghindari terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan sehingga jika terjadi masalah tersebut, maka akan diketahui dan di atasi dengan cepat dan tepat.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal berfungsi

untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih, dengan adanya pengendalian piutang dapat meminimalisir kerugian yang di akibatkan oleh piutang tak tertagih. Pengendalian internal perusahaan merupakan suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, mendorong mematuhi peraturan dan ketentuan manajemen yang telah ditetapkan (Hamel, 2017).

Salah satu koperasi yang didalamnya terdapat kegiatan penjualan kredit dan juga terdapat kegiatan usaha simpan pinjam yang dapat menimbulkan piutang adalah KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan. Awal pembentukan KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan bermula dari pendirian Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan, yang mana kantor dinas koperasi ini bertujuan untuk membina masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan koperasi dengan baik dan benar. Pada KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa kegiatan usaha yaitu, unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertokoan, unit usaha fotocopy, unit bina usaha mikro, dan unit usaha lainnya. Pengurus koperasi berupaya menambah dan mengembangkan jenis usaha lainnya, serta tetap berupaya memaksimalkan melanjutkan unit usaha koperasi yang telah ada, koperasi terus melakukan ekstensifikasi usaha pertokoan dan telah membeli fasilitas toko untuk memenuhi kebutuhan anggota. Jumlah anggota koperasi yang ada di KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 berjumlah 78 anggota. Menilai dari jumlah anggota yang cukup banyak pada KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan

terdapat pelaksanaan yang kurang sesuai. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya rangkapan fungsi kerja seperti halnya yang mencatat keuangan dan pemegang keuangan menjadi satu.

Pada penelitian terdahulu Satiandra (2015) melakukan penelitian dengan judul Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana KPRI Insko menerapkan sistem pengendalian internal. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal belum melakukan pemisahan fungsi kredit dan kasir masih dilakukan oleh satu bendahara dan prosedur-prosedur yang ditetapkan KPRI Insko telah mampu dilaksanakan dengan baik oleh para pengurus KPRI Insko.

Penelitian terdahulu Habibie (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. Adira Finance Cabang Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengendalian intern piutang usaha pada PT. Adira Finance Cabang Manado sudah efektif. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengendalian intern terhadap piutang sudah berjalan dengan efektif, yang mana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern, disisi lain terdapat beberapa prosedur yang belum mencerminkan konsep pengendalian intern.

Penelitian terdahulu Ketaren (2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Pelita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan Koperasi Serba Usaha Surya Pelita dalam menyusun dan mengalokasikan serta menerapkan sistem pengendalian internal

piutang didalam perusahaannya. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit yang diterapkan di KSU Surya Pelita belum efektif yang dikarenakan terdapat beberapa prosedur yang masih belum dilaksanakan.

Pada KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan tidak melakukan dan melaksanakan fungsi pemisahan tugas. Sehingga tidak melakukan fungsi pelaksanaan dalam unsur pengendalian internal piutang merupakan suatu kesalahan kecil yang dapat membuat suatu kesalahan itu menjadi fatal. Kesalahan tersebut adalah karena dilaksanakannya fungsi akuntansi dan fungsi kas oleh satu orang yang sama. Kesalahan ini menjadi fatal, karena dapat menimbulkan kecurigaan akan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya tindakan korupsi, kesengajaan dalam pencatatan jumlah nominal piutang yang mana tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh anggota. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal pada piutang agar tidak terjadi masalah terhadap koperasi. Dengan adanya sistem pengendalian internal piutang yang baik, maka akan meningkatkan penerimaan kas pada koperasi dan target akan tercapai sesuai yang diharapkan oleh anggota dan pengurus. Aktivitas koperasi dapat menjadi optimal jika didukung oleh kemampuan yang baik dan sistem yang terdapat didalamnya juga berjalan dengan baik.

Pada KPRI Melati Kabupaten Bangkalan terdapat perangkapan fungsi yaitu, fungsi akuntansi, fungsi penagihan, dan fungsi kas dilakukan oleh satu orang yang sama. Disisi lain anggota KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel 1.1 berikut ini:

Data Perkembangan keanggotaan selama tiga tahun terakhir dari 2015-2017 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.1
Keanggotaan KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Anggota Awal Tahun	Mutasi		Jumlah Anggota Akhir Tahun	Ket
		Masuk	Keluar		
2015	84	-	-	84	
2016	79	-	-	79	
2017	78	-	-	78	

Sumber: Data Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pengurus dan Pengawas KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan

Pada tabel 1.1 di atas, berisi tentang perkembangan anggota KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2015-2017. Pada tabel 1.1 menunjukkan terjadinya tingkat penurunan pada anggota KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan, mulai dari tahun 2015 yang beranggotakan sebanyak 84 anggota kemudian pada tahun 2016 anggota semakin berkurang sebanyak 5 orang sehingga pada tahun 2016 anggota sebanyak 79 orang, dan pada tahun 2017 terjadi perubahan penurunan anggota sebanyak 1 orang saja yaitu pada tahun 2017 anggota koperasi sebanyak 78 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan penurunan ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari anggota serta kurangnya rasa memiliki terhadap koperasi yang dapat mengakibatkan turunnya partisipasi anggota dalam berbelanja, sehingga juga mengakibatkan menurunnya pendapatan koperasi. Dari hal ini terlihat jelas bahwa dalam koperasi sistem pengendalian piutangnya belum cukup optimal sehingga hal ini dapat menyebabkan jumlah anggota koperasi mulai menurun yang dikarenakan tidak akan ada, gairah anggota apabila koperasinya selalu menderita kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meninjau permasalahan mengenai sistem pengendalian pada piutang. Untuk itu

penulis melakukan penelitian atas sistem pengendalian internal piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Melati” Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul **“Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Melati” Kabupaten Bangkalan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal piutang yang diterapkan di KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana rasio perputaran piutang yang ada di KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal piutang yang diterapkan di KPRI “Melati Kabupaten.
3. Untuk mengetahui rasio perputaran piutang yang ada di KPRI “Melati” Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

1. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Melati” Kabupaten Bangkalan
 Agar dapat mempertahankan atau meningkatkan pengendalian internal piutang khususnya pada pemberian dan kelancaran penerimaan piutang.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Agar memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan yang dihasilkan untuk instansi akademik dan sebagai tambahan bahan referensi pustaka karya ilmiah dalam ruang lingkup hasil karya penulis lapangan.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan meningkatkan *skill* peneliti tentang sistem pengendalian internal piutang yang mungkin akan berguna apabila peneliti menemukan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan di atas tersebut.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan penulis dalam segi teori maupun praktek dan penelitian ini dapat digunakan untuk dasar perbandingan serta referensi bagi penelitian yang sejenis.